E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5272-5281
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Dinamika Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Menuju Level Rp18.000/US$: Analisis Risiko Fiskal dan Dampaknya terhadap Postur APBN Indonesia

Ai Siti Farida[1], Arabella Kirana[2], Irfi Nabilla[3], Leilani Fidela Sarwahita[4], Nayla Balqis Khoerunnisa[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: aisitifarida@uinsgd.ac.id, arabellakirana09@gmail.com, nbillairfi@gmail.com, leilanifidelaa@gmail.com, naylabalqiskhr@gmail.com

Abstrak

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak lagi sekadar persoalan pasar uang, tetapi telah menjadi sumber tekanan yang merembes ke seluruh struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana depresiasi rupiah memengaruhi pembiayaan, belanja, dan penerimaan negara, serta merumuskan strategi mitigasi kebijakan fiskal yang sesuai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur sistematis, dengan data sekunder dari publikasi resmi pemerintah, laporan Bank Indonesia, jurnal ilmiah, dan media bereputasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tematik, sintesis dan triangulasi sumber, serta interpretasi kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan rupiah menjalar ke APBN melalui tiga kanal utama. Pertama, pembengkakan beban pokok dan bunga utang luar negeri berdenominasi valuta asing yang mempersempit ruang fiskal. Kedua, kenaikan biaya impor komoditas strategis, khususnya energi, yang mendorong inflasi dan menambah tekanan pada anggaran subsidi. Ketiga, pelemahan daya beli yang menekan penerimaan pajak berbasis konsumsi. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu menempuh empat strategi mitigasi: memperbaiki penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mengelola utang secara hati-hati dengan memperkuat pembiayaan dalam mata uang domestik, mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan efektivitas perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan memakai data kuantitatif untuk mengukur pengaruh perubahan nilai tukar terhadap tiap komponen APBN.

Kata Kunci: APBN, Mitigasi Kebijakan Fiskal, Nilai Tukar Rupiah, Subsidi Energi, Utang Luar Negeri

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5272-5281
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

The depreciation of the rupiah against the US dollar is no longer merely a financial market issue; it has become a source of pressure that permeates the entire structure of the State Budget (APBN). This study aims to explain how rupiah depreciation affects state financing, expenditure, and revenue, and to formulate appropriate fiscal policy mitigation strategies. It employs a descriptive qualitative approach through a systematic literature review, drawing on secondary data from official government publications, Bank Indonesia reports, scholarly journals, and reputable media. The analysis was conducted through data reduction, thematic categorization, source synthesis and triangulation, and qualitative interpretation. The findings show that pressure from the rupiah transmits to the APBN through three main channels. First, the swelling of principal and interest payments on foreign-currency-denominated external debt narrows fiscal space. Second, rising import costs for strategic commodities, particularly energy, drive inflation and add pressure to the subsidy budget. Third, weakened purchasing power depresses consumption-based tax revenue. In response, the government needs to pursue four mitigation strategies: improving the distribution of energy subsidies to make them better targeted, managing debt prudently by strengthening domestic-currency financing, optimizing state revenue by improving tax effectiveness, and strengthening fiscal and monetary policy coordination between the Ministry of Finance and Bank Indonesia. Future research is advised to use quantitative data to measure the effect of exchange rate changes on each component of the APBN.

Keywords: Energy Subsidies, External Debt, Fiscal Policy Mitigation, Rupiah Exchange Rate, State Budget (APBN)

LATAR BELAKANG

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah salah satu indikator yang paling cepat memengaruhi kondisi keuangan negara, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas strategis seperti energi, bahan baku industri, dan pangan, sehingga stabilitas kurs menjadi prasyarat penting bagi pengendalian inflasi dan keberlangsungan ekonomi. Pelemahan rupiah tidak berhenti sebagai persoalan pasar uang semata, melainkan merembet secara luas ke lonjakan harga barang impor, pembengkakan beban utang berdenominasi valuta asing, hingga pengurasan cadangan devisa negara untuk melakukan intervensi pasar, yang secara keseluruhan menciptakan tekanan multidimensional terhadap stabilitas makroekonomi nasional (Hidayat et al., 2026).

Bagi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tekanan nilai tukar ini dirasakan secara langsung dari sisi pembiayaan anggaran yang harus menutup defisit menahun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pengelolaan pembiayaan dalam negeri demi menghindari kerentanan tinggi akibat risiko nilai tukar luar negeri (Nisak, 2022). Dinamika pelemahan kurs tersebut terbukti memperbesar beban utang luar negeri

Indonesia secara signifikan dengan nilai elastisitas yang menunjukkan bahwa setiap pelemahan kurs sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan utang luar negeri sebesar 0,80% (Arifa, 2026).

Tekanan fiskal akibat kurs yang melemah juga merembet tajam ke pos belanja negara, terutama pada sektor subsidi energi yang pernah menyedot 16,2% dari total belanja negara dan memaksa pemerintah melakukan perombakan anggaran drastis dari Rp502,4 triliun menjadi Rp208,9 triliun disertai penyesuaian harga bahan bakar minyak demi mencegah defisit anggaran yang lebih dalam (Kasma & Aryanty, 2022). Kebijakan penyesuaian anggaran dan harga energi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat luas, khususnya kelompok berpendapatan rendah, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada keseimbangan antara belanja dan penerimaan serta kuatnya koordinasi bersama otoritas moneter (Alfidyah, 2025).

Untuk menjembatani pembahasan antara tekanan nilai tukar dan pengelolaan keuangan negara, analisis menggunakan kerangka teori ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang memandang anggaran negara sebagai instrumen utama stabilitas ekonomi. Dalam pendekatan ini, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi dan distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai peredam kejutan ketika terjadi gejolak eksternal seperti fluktuasi kurs valuta asing. Ketika guncangan global terjadi, pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan penerimaan negara dan beban pengeluaran riil agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Huatagalung et al., 2026)

Kajian mengenai permasalahan ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan karena tekanan terhadap rupiah berpotensi menjalar ke seluruh pos APBN secara bersamaan dalam skenario ekstrem seperti ketika kurs menembus Rp18.000 per dolar AS yang memicu lonjakan inflasi, kenaikan beban utang korporasi, penyempitan ruang gerak fiskal akibat biaya subsidi dan cicilan bunga utang yang membengkak, hingga risiko melesetnya target ekonomi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun berbagai literatur sebelumnya telah membahas aspek kurs, utang luar negeri, peran sukuk, SBN, dan sinergi kebijakan secara terpisah-pisah, hubungan komprehensif antara pelemahan rupiah dan dampaknya terhadap pos belanja, pembiayaan utang, serta defisit APBN dalam satu kerangka utuh masih memerlukan elaborasi mendalam.

Guna mengisi celah dalam literatur dan memberikan pemahaman yang menyeluruh, kajian ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana dinamika pelemahan rupiah memengaruhi struktur APBN dari sisi belanja maupun pembiayaan. Selain itu, pemaparan di dalamnya diarahkan untuk mengidentifikasi saluran transmisi gejolak kurs terhadap defisit anggaran dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus merumuskan opsi kebijakan fiskal serta moneter yang terkoordinasi demi menjaga ketahanan APBN dalam jangka panjang. Hasil dari pembahasan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka pemikiran yang padu mengenai dampak stabilitas kurs terhadap keuangan publik, sekaligus menjadi bahan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi mitigasi risiko makroekonomi yang lebih terukur.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode studi literatur atau tinjauan pustaka sistematis. Pendekatan tersebut dipilih karena sangat memungkinkan proses penelaahan yang mendalam terhadap berbagai dokumen kebijakan publik, riset terdahulu, serta data sekunder guna memetakan dinamika pelemahan nilai tukar terhadap postur anggaran belanja negara secara menyeluruh. Seluruh tahapan riset dirancang secara terstruktur dan terukur untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai potensi pembengkakan beban fiskal. Melalui skema tinjauan pustaka, analisis dapat difokuskan pada penguraian konsep, dampak, serta interaksi antarvariabel makro ekonomi tanpa harus menjalankan prosedur pengujian eksperimental di lapangan.

Sumber data yang melandasi seluruh pembahasan bersumber dari data sekunder yang disarikan dari dokumen publikasi resmi pemerintah, laporan berkala lembaga otoritas, jurnal ilmiah, hingga pemberitaan media massa bereputasi. Dokumen utama mencakup publikasi Nota Keuangan serta Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan, data statistik pergerakan nilai tukar beserta laporan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, serta artikel jurnal ilmiah yang mengulas topik keuangan publik dan dinamika makroekonomi domestik. Selain itu, informasi pendukung juga diperoleh dari siaran pers serta rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan lembaga analisis keuangan independen. Seluruh rujukan tersebut dikumpulkan dan dipilah guna melihat korelasi langsung antara fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap beban pembiayaan utang dan pengeluaran belanja negara.

Prosedur pencarian serta pengumpulan literatur dilakukan secara cermat melalui penelusuran daring pada berbagai basis data akademik terkemuka, seperti Google Scholar, portal SINTA, dan platform repositori publikasi ilmiah nasional. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian disesuaikan dengan fokus pembahasan, mencakup frasa-frasa seperti "nilai tukar rupiah", "depresiasi rupiah", "ketidakpastian ekonomi global", "beban utang luar negeri", serta "subsidi energi APBN". Dokumen yang berhasil dijaring kemudian melewati tahap penyaringan ketat berdasarkan kriteria kesesuaian substansi, kebaruan tahun terbitan, serta tingkat kredibilitas lembaga yang menerbitkannya. Langkah penyaringan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bahan bacaan yang digunakan benar-benar valid dan mampu menjawab permasalahan secara komprehensif.

Tahapan analisis data dilaksanakan melalui empat tahapan utama yang runtut agar seluruh penelusuran materi tetap terarah pada tujuan awal. Tahap pertama dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring dan membuang informasi yang tidak relevan sehingga tersisa dokumen literatur yang memuat pembahasan substansial mengenai anggaran dan nilai tukar. Tahap kedua dilanjutkan dengan kategorisasi tematik guna mengelompokkan bahan bacaan ke dalam tiga poros pembahasan utama, yakni jalur transmisi keuangan, tekanan pada anggaran subsidi energi, serta strategi mitigasi kebijakan fiskal. Tahap ketiga melibatkan proses sintesis serta triangulasi antar-sumber untuk menguji keabsahan dan konsistensi temuan dari berbagai sudut pandang. Tahap akhir diisi dengan proses interpretasi kualitatif

guna menyusun penjelasan yang logis serta menarik kesimpulan yang objektif mengenai tingkat ketahanan anggaran negara.

Guna menjamin validitas serta keandalan temuan yang disajikan, penelitian menerapkan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan klaim atau data statistik pada minimal dua jenis referensi yang memiliki karakteristik berbeda. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan perbedaan nilai, interpretasi, maupun angka antar-sumber, prioritas utama selalu diberikan kepada rilis data resmi dari lembaga otoritas seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, atau Badan Pusat Statistik karena sifat datanya yang terstandardisasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Di sisi lain, keterbatasan utama dari pendekatan studi literatur terletak pada penggunaan data sekunder sepenuhnya, sehingga riset tidak melakukan pengujian ekonometrika atau pengolahan statistik mandiri. Walaupun demikian, pendekatan tersebut tetap dipandang sangat efektif dan relevan untuk memberikan pemetaan informasi mutakhir atas fenomena pelemahan Rupiah yang tergolong dinamis serta berdampak luas bagi perekonomian nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalur Transmisi Pelemahan Rupiah ke Keuangan Negara

Dinamika perekonomian global yang ditandai oleh tingginya ketidakpastian geopolitik serta pengetatan suku bunga bank sentral Amerika Serikat *(The Federal Reserve)* memberikan tekanan masif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah (Simamora, 2026). Depresiasi mata uang domestik terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tidak berhenti sebagai fluktuasi pasar finansial semata, melainkan merembes secara langsung ke dalam struktur makroekonomi domestik. Laju pelemahan mata uang yang terjadi secara terus-menerus memicu guncangan pada indikator-indikator utama penetapan APBN (Surdikina et al., 2025). Proses penjalaran atau transmisi guncangan kurs tersebut memengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui beberapa kanal utama yang berkaitan erat dengan penerimaan, pembiayaan, serta pengeluaran belanja negara.

Kanal transmisi pertama dan paling krusial terletak pada sektor pembiayaan anggaran, khususnya yang bersumber dari utang luar negeri berdenominasi valuta asing. Ketika nilai tukar Rupiah melemah hingga mendekati atau melampaui batas asumsi makro yang ditetapkan dalam undang-undang APBN, beban konversi untuk membayar kewajiban pokok dan cicilan bunga utang luar negeri mengalami lonjakan seketika secara nominal dalam mata uang rupiah (Mas'ul et al., 2026). Pemerintah yang harus melunasi kewajiban utang dalam mata uang keras *(hard currency)* terpaksa mengalokasikan porsi anggaran pendapatan yang jauh lebih besar hanya untuk melayani servis utang *(debt service ratio).* Kondisi yang demikian secara langsung mempersempit ruang fiskal *(fiscal space)* nasional, sehingga alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, dan program kesejahteraan sosial menjadi tergerus akibat tingginya beban kewajiban fiscal (Affandi et al., 2026).

Selain sektor pembiayaan utang, jalur transmisi kedua beroperasi melalui komponen pembiayaan impor komoditas strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak. Sejumlah kebutuhan vital nasional, seperti minyak mentah untuk bahan bakar, bahan baku industri

manufaktur, hingga pasokan pangan pokok, sangat bergantung pada transaksi pasar internasional yang menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat (Rajendra, 2025). Pelemahan Rupiah menyebabkan biaya perolehan *(landed cost)* barang-barang impor tersebut melonjak drastis, yang kemudian mendongkrak harga pokok keekonomian di tingkat domestik secara signifikan. Akibatnya, tekanan inflasi merayap naik dan memaksa pemerintah menggelontorkan intervensi anggaran tambahan guna meredam gejolak harga pasar melalui berbagai instrumen bantuan sosial serta bantalan ekonomi masyarakat (Ardian et al., 2024).

Kanal transmisi ketiga dapat diidentifikasi pada sektor pendapatan negara, terutama dari penerimaan perpajakan dan sektor kepabeanan. Meskipun depresiasi mata uang dalam taraf tertentu dapat mendongkrak nominal penerimaan rupiah dari sektor ekspor komoditas, pelemahan daya beli domestik akibat kenaikan harga barang impor justru menekan volume transaksi konsumsi rumah tangga secara luas (Ardijanto et al., 2026). Penurunan tingkat konsumsi masyarakat secara langsung menekan perolehan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) badan yang bersumber dari aktivitas perdagangan dalam negeri. Kombinasi antara menurunnya efektivitas penerimaan pajak berbasis konsumsi domestik dan membengkaknya beban pengeluaran valas menciptakan ketidakseimbangan struktural yang menuntut kewaspadaan serta kedisiplinan tinggi dari otoritas pengelola keuangan negara.

Tekanan pada Anggaran Subsidi dan Belanja Negara

Penelitian mendukung pentingnya perhatian hubungan faktor eksternal dengan kondisi ekonomi lokal. Merujuk pada data bulanan periode 2006-2024, penelitian tersebut mendapati keterkaitan keseimbangan jangka panjang antara subsidi BBM, nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, dan inflasi. Hasilnya memperlihatkan bahwa peningkata harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar berdampak positif terhadap inflasi jangka panjang, tetapi perubahan nilai tukar dan harga energi internasional dapat menyebabkan tekanan harga di dalam negeri. Namun, akibatnya terhadap anggaran subsidi perlu dilihat melalui data fiskal karena peningkatan inflasi tidak secara langsung menunjukkan besarnya tambahan belanja subsidi.

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa realisasi subsidi energi difaktori oleh perubahan harga minyak Indonesia (Indonesian *Crude*/ICP), nilai tukar rupiah, harga produk yang di subsidi, dan volume penyaluran energi (Ramdhani et al., 2025). Tekanan terhadap anggaran subsidi dapat dilihat melalui realisasi APBN semester I tahun 2025.

Tabel 1. Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2025

Komponen Subsidi	Realisasi	Persentase dari pagu
Energi	Rp66,894 triliun	32,9%
BBM dan LPG 3 Kg	Rp30,285 triliun	26,6%
Listrik	Rp36,610 triliun	40,8%

Sumber: (**Keuangan**, **2025**)

Berdasarkan Tabel 1, komponen subsidi energi merupakan komponen belanja yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan mempertimbangkan perubahan situasi ekonomi. Jika dihadapkan dengan situasi harga minyak naik dan peningkatan biaya energi melonjak, maka pemerintah membutuhkan dana yang lebih besar untuk mempertahankan kebijakan subsidi. Namun, persentase realisasi pada semester I tidak cukup menyimpulkan bahwa anggaran subsidi akan melampaui pagu pada akhir tahun.

Dari segi keberlanjutan fiskal, terdapat hubungan jangka panjang antara defisit anggaran, subsidi BBM, dan benturan eksternal, di mana subsidi BBM dapat berfungsi sebagai peredam benturan ekonomi yang melindungi daya beli masyarakat sekaligus posisi fiskal pemerintah, sehingga tidak hanya menjadi beban belanja tetapi juga peredam ketika terjadi perubahan situasi ekonomi (Asido & Ragimun, 2026). Tantangan pengelolaan keuangan negara bukan hanya terletak pada besarnya anggaran subsidi, tetapi pada kemampuan pemerintah mempersiapkan perubahan harga energi dan nilai tukar.

Strategi Mitigasi Kebijakan Fiskal

Pelemahan nilai tukar rupiah mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi mitigasi kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Kenaikan biaya impor, pembengkakan anggaran subsidi energi, dan peningkatan risiko pembiayaan utang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah. APBN berperan sebagai instrumen stabilisasi fiskal ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal, sekaligus memperhatikan risiko nilai tukar, perubahan suku bunga, dan pembiayaan kembali utang dalam pengelolaan keuangan negara (Mustari, 2026). Pemerintah perlu mengombinasikan pengendalian belanja, pengelolaan utang, dan penguatan penerimaan negara agar APBN tetap mampu membiayai program pembangunan prioritas di tengah perubahan kondisi ekonomi global.

Strategi pertama berfokus pada perbaikan mekanisme penyaluran subsidi energi agar pemerintah dapat menggunakan anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran. Pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor energi sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sebagian besar subsidi LPG justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sedangkan sebagian rumah tangga berpenghasilan rendah masih menggunakan bahan bakar alternatif, sehingga mekanisme subsidi berbasis komoditas direkomendasikan untuk diubah menjadi subsidi yang ditujukan secara langsung kepada rumah tangga sasaran (Gobel et al., 2023). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah agar perubahan kebijakan tidak menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Strategi kedua menekankan pentingnya pengelolaan utang secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan nilai kewajiban utang luar negeri ketika pemerintah mengonversinya ke dalam mata uang domestik. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban APBN dan mengurangi ruang anggaran untuk membiayai program pembangunan. Keberlanjutan fiskal Indonesia selama periode 1998–2017 menekankan pentingnya diversifikasi sumber penerimaan, peningkatan kualitas belanja

publik, serta pengelolaan utang secara hati-hati, di mana pemerintah perlu mempertimbangkan biaya pembiayaan dan risiko nilai tukar ketika menentukan strategi pengelolaan utang (Paramita, 2021). Pemerintah juga dapat memperkuat pembiayaan dalam mata uang domestik untuk mengurangi kerentanan pembayaran kewajiban terhadap fluktuasi nilai tukar.

Strategi ketiga berfokus pada penguatan penerimaan negara melalui peningkatan efektivitas sistem perpajakan. Pelemahan rupiah dan perubahan harga energi dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta penerimaan negara. Pemerintah perlu mengelola penerimaan secara cermat agar tetap mampu membiayai belanja prioritas ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan. Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dan pajak penghasilan dalam model penelitiannya, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan kondisi makroekonomi ketika menyusun perencanaan penerimaan negara (Syaiful, 2022). Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, dan memperkuat pengawasan terhadap potensi penghindaran pajak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan domestik sehingga pemerintah tetap memiliki kapasitas untuk membiayai APBN ketika tekanan eksternal meningkatkan kebutuhan belanja.

Strategi keempat menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kementerian Keuangan bertanggung jawab menjaga disiplin anggaran dan keberlanjutan fiskal, sedangkan Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan mandatnya dalam menjaga stabilitas moneter, termasuk stabilitas nilai rupiah. Inflasi menunjukkan respons yang lebih cepat menuju kondisi stabil setelah mengalami guncangan kebijakan fiskal dibandingkan dengan guncangan kebijakan moneter, yang mengindikasikan bahwa instrumen fiskal dan moneter memiliki mekanisme serta waktu respons yang berbeda. Oleh karena itu, kedua otoritas perlu mengoordinasikan kebijakan dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, pergerakan nilai tukar, kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan kondisi perekonomian secara menyeluruh. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko pertentangan antarkebijakan ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal (Paramita, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi mitigasi kebijakan fiskal yang mencakup perbaikan mekanisme penyaluran subsidi energi, pengelolaan utang secara hati-hati, penguatan penerimaan negara, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah juga perlu memantau pergerakan nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, realisasi belanja subsidi, dan kewajiban pembayaran utang untuk mengidentifikasi potensi tekanan terhadap APBN sejak dini. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penyesuaian fiskal sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya perlu mengendalikan defisit anggaran, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

SIMPULAN

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui peningkatan beban pembayaran utang luar negeri, kenaikan biaya impor energi, dan perubahan penerimaan perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah, meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi, serta memengaruhi kemampuan negara membiayai pembangunan. Besarnya dampak bergantung pada perubahan nilai tukar, harga minyak dunia, struktur utang, dan kondisi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga ketahanan APBN melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Pemerintah disarankan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, mengelola utang dengan mempertimbangkan risiko nilai tukar, serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga perlu memperkuat koordinasi kebijakan sesuai kewenangan masing-masing guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memantau pergerakan nilai tukar, harga minyak dunia, dan realisasi belanja negara sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Penelitian selanjutnya diarahkan untuk memanfaatka data kuantitatif dalam mengukur pengaruh pelemahan rupiah terhadap komponen APBN sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A., Ramadani, S. P., & Falakh, I. F. (2026). Tinjauan Literatur: Analisis Kondisi Ekonomi Indonesia di Tengah Melemahnya Rupiah dan Turunnya IHSG. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(6). https://doi.org/https://doi.org/10.62281/4a5h0b44

Alfidyah, M. (2025). Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(1), 30–37.

Ardian, A., Sandi, A., Taqiyah, D. B., & Harun, M. (2024). Analisis Pengaruh Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Pada Bidang Ekspor Dan Impor. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(3), 90–101. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2580

Ardijanto, T. T., Faeni, D. P., & Amiruddin, E. (2026). Dampak Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Supply , Demand dan Price: Perspektif Keuangan Manajerial. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, *4*(3), 875–883. https://doi.org/https://doi.org/10.60126/maras.v4i3.1651

Arifa, Z. N. (2026). Pengaruh Nilai Tukar Dan Cadangan Devisa Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2010-2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(1), 82–89.

Asido, P. T., & Ragimun. (2026). Indonesian Treasury Review Global Shock Transmission to the Budget Deficit: The Role. *Indonesian Treasury Review*, *11*(3), 215–226.

Gobel, R. K., Laksmono, B. S., Huseini, M., & Siscawati, M. (2023). Subsidi Elpiji Untuk Siapa? Mendorong Perbaikan Kebijakan Sebagai Instrumen Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *31*(1), 83–100. https://doi.org/10.55981/jep.2023.265

Hidayat, A. B. F., Huda, N., & Faeni, D. P. (2026). Analisis pengaruh pelemahan rupiah terhadap krisis ekonomi: Studi kasus ketika dollar tembus Rp18.000. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(August), 1123–1133. https://doi.org/https://doi.org/10.61231/cp4agq63

Huatagalung, A. T., Harahap, L. M., Manik, A. M. C. B., & Malau, S. (2026). Analisis Literatur Terhadap Peran Strategis Kebijakan Fiskal dan Struktur APBN dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, *4*(2), 79–87. https://doi.org/https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v4i2.1400

Kasma, J., & Aryanty, N. (2022). *Perekonomian Indonesia Saat Subsidi Dipersempit dan PPN Melejit*.

Keuangan, K. (2025). *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2025*. 2025.

Mas'ul, E., Septiningtyas, A. S., Rosilah, & SyafaatulHidayati. (2026). Dinamika Utang Luar Negeri Indonesia dan Risiko Stabilitas Ekonomi Jangka Panjang. *2026*, *03*(02), 17–24. https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jukoni.v3i2.1477

Mustari, N. H. (2026). Peran APBN terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global dan Pengelolaan Utang Negara. *Jurnal Jumanis-Baja*, *08*(1), 60–76.

Nisak, K. (2022). Sukuk Negara sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, *2*(1), 57–72. https://doi.org/https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199

Paramita, R. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019. *Jurnal Budget*, *6*(1), 152–168.

Rajendra. (2025). *Efek Domino Rupiah Melemah, Harga Kebutuhan Pokok Terancam Naik*. Joss.Co.Id. https://doi.org/https://joss.co.id/2025/09/efek-domino-rupiah-melemah-harga-kebutuhan-pokok-terancam-naik/

Ramdhani, F. A., Putri, K. E., Aprilianti, S., & Dewi, D. P. (2025). Pandangan Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *6*(1), 38–49.

Simamora, N. (2026). *Harga Minyak dan Rupiah Melemah, Risiko Pembengkakan Subsidi Energi Membesar*. Kontan.Co.Id. https://doi.org/https://nasional.kontan.co.id/news/harga-minyak-dan-rupiah-melemah-risiko-pembengkakan-subsidi-energi-membesar

Surdikina, N., Tompul, R. B., Sianipar, S. B., & Santika, S. (2025). Strategi Pengelolaan Utang Negara: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(1), 162–173.

Syaiful, S. (2022). Pengaruh Harga Minyak Mentah terhadap Penerimaan Perpajakan dan Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal Budget*, *7*(2), 203–218.